

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya konflik antara bendahara selaku (*agent*) dengan kepala bagian selaku (*principal*). Menurut (Jensen dan Meckling, 1976), *principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam pemerintah. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (*manajemen*). Berdasarkan laporan tersebut, *principal* dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dipercaya (*reliabel*) maka diperlukan monitoring yang hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Auditor Independen untuk dapat melakukan kegiatan auditing. Maka dengan adanya teori keagenan ini, dapat membantu auditor dalam memahami konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal* yang berujung pada tindakan kecurangan (Rafika, 2020).

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam (Rafika, 2020) merupakan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*)

memperkerjakan orang lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Mengenai ruang lingkup pemerintah, hubungan keagenan terjadi dimana rakyat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah berperan sebagai agensi. Dimana pemerintah merupakan agen yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadikan tolak ukur dalam pertanggungjawaban pemerintah selaku agen kepada masyarakat selaku prinsipal (Rahayu, 2020).

Oleh karena itu, Auditor yang berasal dari pihak eksternal pemerintah yang independen diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif untuk dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan yang terjadi didalam pemerintahan. Kemudian diharapkan dapat melakukan audit dengan menghasilkan opini audit yang sesuai dengan kondisi lapangan serta mengurangi biaya yang dikeluarkan akibat adanya benturan kepentingan tersebut. Hubungan judul penelitian ini, dengan teori keagenan dilihat dari pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

2.1.2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah menurut (Tanjung, 2014) mendefenisikan sebagai berikut “proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukannya.

Sedangkan menurut *governmen accounting standar board* 1987 seperti kutipan Anjani (2018) bahwa akuntansi pemerintahan adalah suatu kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersasar pada kosep dasar ilmu akuntansi secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial.

Berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah adalah penyelegarakan pemerintahan daearah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik indonesia dan sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar 1945 (Bawono, 2012).

Pemerintah daerah adalah gubenur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Tanjung, 2014). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diatur undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras bedasarkan undang- undang.

Pemerintah daerah adalah peneyelenggarakan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prisip negara kesatuan republik indonesia sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggara fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal

apabila penyelenggara urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewewenang antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Tujuan akuntansi pemerintahan (Muindro, 2017) menyatakan bahwa akuntansi pemerintah mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintah yang lebih lanjut tujuan pertanggung jawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberi pertanggung jawaban atau perhitungan.

2. Manejerial

Tujuan manejerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang di perlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran perumusan kebijakan, penulisan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Secara umum, laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode yang biasanya satu tahun. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Mamulati, 2022).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Basukianto dan Febrian, 2015).

Menurut PSAK No. 01 paragraf ke 7, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan - catatan dan bagian integral dari laporan keuangan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi data-data keuangan. Data-data keuangan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas organisasi tersebut.

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan (Sako, 2018).

Menurut PSAP No. 1 paragraf ke 3, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan pemerintah bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2017) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Seperti yang dijelaskan dalam kerangka konseptual peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, keputusan sosial, maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Mardiasmo (2017) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan;
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan;
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilihan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional; dan
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut

akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary repots*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (Mardiasmo, 2017):

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4. Struktur dan Isi

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan

realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur – unsur (Luqyana & Islahudin, 2022) sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA;

- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- 1) Saldo anggaran lebih awal;
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Yanti & Nurhidayah, 2020).

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan (Yanti & Nurhidayah, 2020).

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut (Yanti & Nurhidayah, 2020):

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (Azharsyah, 2021).

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (Azharsyah, 2021).

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah :

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (Azharsyah, 2021).

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Azharsyah, 2021).

Kualitas laporan keuangan peraturan pemerintah standar akuntansi pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik laporan keuangan adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Tanjung, 2014).

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan ;

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*oredictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi juga hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5. Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah

2.1.5.1.Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Ikpi, 2012). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut dengan *cash towards accrual*.

PP No.24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas menuju akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, ekuitas dan berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari (a) *Laporan Realisasi Anggaran*; (b) *Neraca*; (c) *Laporan Arus Kas*; (d) *Catatan Atas Laporan Arus Kas*. SAP diterapkan dilingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan

organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menuntut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme presedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) oleh komite standar akuntansi pemerintahan (Bastian, 2016).

Sistem pemerintah yang baru merupakan sistem akuntansi pelaporan keuangan yang akan mengelola semua transaksi keuangan sumber-sumber kewajiban dana pemerintahan pusat dan akan menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintahan pusat.

Dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan keuangan pelaksanaan anggaran. (Tanjung, 2014). Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yang digunakan pelaporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pokok, meliputi neraca, realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat PSAP No 1, 2, 3, 4, (Bastian, 2006). Kandungan yang digunakan pada pelaporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pokok yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

PSAP 01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, basis akuntansi, periode pelaporan, komponen laporan keuangan.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan neto dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

3. PSAP NO 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara, kas daerah, selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara/daerah dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas umum negara kas daerah ini sesuai dengan basis yang dianut yaitu basis kas menuju akural.

4. PSAP No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bentuk laporan keuangan paling tidak terstruktur, sehingga cara pembacanya pun sangat akrab dengan cara pembaca yang dikuasai oleh kaum awam. Oleh karena itu jika catatan atas laporan keuangan ini dapat memuat aspek-aspek

yang memandai dan lengkap, bisa jadi ia akan menjadi suatu sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan bagi pengguna umum. Pada intinya isi catatan ini adalah mengurangi berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang apabila tidak dijelaskan akan dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut (Tanjung, 2014) terdapat perubahan dan penambahan KSAP terbaru yakni :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan berbasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang berbasis akrual.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mengatur penyajian laporan arus kas yang memberi

informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan dengan mengklafikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keunagan bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemahaman untuk yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah yang lazim.

5. Akuntansi Persediaan

Akuntansi persediaan akuntansi yang mencatat persediaan yang disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis.

6. Akuntansi Investasi

Akuntansi investasi adalah akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan mengungkapkan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7. Akuntansi Aset Tetap

Akuntasi aset tetap adalah akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah dalam aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan nilai tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntasnsi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

8. Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan adalah akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk kontruksi dalam mengerjakan metode nilai historis.

9. Akuntansi Kewajiban

Akuntansi kewajiban adalah akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. Akuntansi Koreksi Kesalahan

Akuntansi koreksi kesalahan adalah mengatur akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

11. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian adalah akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimasud.

12. Laporan operasional

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan, beban, surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Menurut (Abdul, 2018) beberapa standar yang penting dalam akuntansi pemerintahan yakni :

1. Akuntansi dana

- a. Akuntansi pemerintah disusun dan dioperasikan berdasarkan dana.
- b. APBN adalah persetujuan dari badan legislatif kepada pemerintah yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang di pertanggung jawabkan sebagai dana tunggal.
- c. Dana tunggal merupakan sesuatu situasi dimana semua pendapatan yang diterima pemerintah dan dana yang di keluarkan akan pertanggung jawaban sebagai entitas tunggal. Dana ini biasanya di sebut dengan dana umum.
- d. Pengukuran hasil operasi anggaran (realisasi anggaran)

Bagian ini menjelaskan beberapa prinsip dan standar akuntansi yang akan digunakan dalam akuntansi dan pelaporan transaksi-transaksi laporan keuangan yang berasal dari pelaksana anggaran negara. (Bastian, 2016:98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atas prosedur yang baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawab pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

PP.No 24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas menuju akural yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan yang berbasis

kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akural. Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum akuntansi pemerintah. Sedangkan sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah.

Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah diatur dengan peraturan menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian intern dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.

2.1.5.2. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Dhonal dkk., 2018).

SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dilingkungan pemerintahan daerah terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan organisasi haruslah yang baik serta dapat memberikan pengaruh dalam mendukung terciptanya pengendalian intern dan manajemen yang baik, harus diciptakan dan dipelihara dengan baik oleh para pimpinan instansi pemerintah serta seluruh pegawai yang ada.

b. Penilaian risiko

Risiko yang di alami oleh organisasi harus dapat diberikan penilaian oleh pengendalian internal baik itu dari dalam ataupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan dari pengendalian ini dapat memberi masukan dari pimpinan Instansi Pemerintah secara pasti atau tidaknya dilaksanakan secara efisien juga efektif untuk pencapaian organisasi yang diinginkan.

d. Informasi dan komunikasi

Pemimpin dari Instansi Pemerintah atau pihak lain yang sudah dipilih harus mendapatkan catatan Informasi dan laporan dengan segera. Penyajian informasi dalam bentuk atau sarana tertentu juga tepat sesuai pada waktunya dapat membuat pimpinan Instansi Pemerintah sebisa mungkin mewujudkan pengendalian serta bertanggung jawab.

e. Pemantauan

Kualitas kinerja harus dapat dilihat dan dipantau sepanjang waktu dan dapat menindak lanjuti hasil rekomendasi hasil audit dan review yang telah dipastikan dengan sesegera mungkin.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut.

- a. Strategis, sasaran-sasaran utama (*high-level goals*) yang mendukung misi entitas.
- b. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
- c. Operasi (pengendalian operasional atau *operational controls*).
- d. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit, khususnya ditujukan pada pelaporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan untuk keperluan eksternal.

Menurut (Beasley, 2015) secara keseluruhan ada tiga tujuan dalam membuat rancangan efektifnya sebuah sistem pengendalian internal, yaitu:

a. Reliabilitas pelaporan keuangan.

Manajemen memiliki tanggung jawab dalam menyediakan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen dengan baik mampu menjalankan tanggung jawab hukum maupun profesional dalam meyakinkan bahwa informasi yang telah diberikan secara wajar sesuai dengan syarat-syarat pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan IFRS. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang efektif ini adalah agar dapat memberikan tanggung jawab penuh terhadap pelaporan keuangan tersebut.

b. Efisiensi dan Efektivitas operasi.

Perusahaan yang memegang kendali dengan sangat baik akan mampu untuk mendorong pemakaian sumber daya dengan lebih efisien dan efektif serta dapat mengoptimalkan target-target pencapaian tujuan perusahaan. Pentingnya tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mendapatkan informasi baik itu berupa keuangan dan non keuangan yang tepat sasaran mengenai operasi perusahaan untuk kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan.

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan.

Selain mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, nonpublik, nirlaba diwajibkan menuruti semua hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Beberapa hanya memiliki hubungan yang secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti halnya undang-undang perlindungan lingkungan dan hak sipil, sedangkan yang lainnya yaitu berkaitan dengan erat terhadap akuntansi, contohnya adalah peraturan pajak penghasilan dan provisi legal anti kecurangan.

3. Unsur – Unsur Pengendalian Internal

Menurut (Mulyadi, 2017), unsur utama dalam sebuah sistem pengendalian internal adalah:

- a. Struktur organisasi yang tanggung jawab fungsionalnya sudah dipisah dengan tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
 - 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
 - 2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan

biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

c. Praktik yang jujur dan adil dalam menjalankan kewajiban, tugas serta fungsi dari setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

- 1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
- 2) Pemeriksaan mendadak
- 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi
- 4) Perputaran jabatan
- 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
- 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya
- 7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain

- d. Mutu karyawan yang telah disesuaikan dengan porsi tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

4. Prinsip Pengendalian Internal

Pengendalian akuntansi akan dapat diwujudkan bila suatu sistem memiliki enam prinsip dasar dari pengendalian intern yang berupa:

- a. Pemisahan fungsi

Tujuan utama dari pemisahan fungsi ini yaitu untuk dapat terhindar dan melakukan pengawasan segera jika terjadi suatu kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi ini adalah agar dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

b. Prosedur pemberian wewenang

Maksud dan tujuan dari prinsip ini adalah agar dapat terjaminnya bahwa tiap transaksi telah diotorisasi oleh orang yang sudah diberi kewenangan.

c. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang sangat utama sekali dalam mewujudkan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen memberi pondasi sebagai dasar penetapan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mencatat akuntansi.

d. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan dari pengendalian ini adalah agar bisa disediakan nya catatancatatan akuntansi yang telah dicermati secara cepat dan tepat serta data akuntansi bisa segera dilaporkan pada pihak-pihak yang menggunakan secara tepat pada waktunya.

e. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik ini memiliki hubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan alat elektronis dalam melaksanakan dan mencatat suatu transaksi.

f. Bebasnya pemeriksaan internal

Hal ini yaitu tentang perbandingan antara catatan asset dengan asset yang sebenarnya memang ada.

SAS mengartikan pengendalian internal menjadi lima komponen yang memiliki kaitan pada pernyataan COSO, yaitu (Mulyadi, 2017), :

- a. Lingkungan pengendalian, yaitu memperlihatkan suasana suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki pengaruh pada kesadaran pengendalian dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Hal itu menjadi sebuah dasar bagi bagian satu dengan yang lainnya dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang terbentuk dari atas.
- b. Penilaian risiko, yaitu sebuah mekanisme yang dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko dalam organisasi yang dihubungkan dalam pencapaian suatu target
- c. Aktivitas pengendalian, meliputi kebijakan dan proses yang dilakukan untuk membantu dalam meyakinkan semua tindakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan petunjuk yang efektif serta efisien dari manajemen
- d. Informasi dan komunikasi, membuat orang-orang yang berada dalam organisasi untuk mendapatkan serta menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam mengatur, menjalankan dan mengelola suatu kegiatan operasional
- e. Pengawasan, adalah sebuah proses dalam menilai kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal, juga penyesuaian dan pelengkapan yang akan dibutuhkan.

2.1.5.3. Pemanfaatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Teknologi informasi terdiri dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan

teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk melakukan sebuah proses dan menyimpan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi dalam menyebarkan informasi. Komputer merupakan alat suatu komponen teknologi informasi yang dapat membuat usaha yang dimiliki oleh manusia menjadi berkali lipat dan melakukan sesuatu yang bagi manusia mungkin akan sulit untuk dilakukan bahkan mungkin tidak bisa.

Pemrosesan data secara manual mungkin akan kurang efektif, apalagi jika dilihat dari sisi volume serta biaya dari tenaga kerja manusia yang tinggi walau cukup stabil. Sementara jika pemrosesan data tersebut menggunakan mesin yang biaya awalnya lebih besar, tetapi seiring berjalan dan perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Terlihat dari perbedaan keduanya memiliki hubungan dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika pengintegrasian komponen dan komputer ini dengan teknologi informasi akuntansi tersebut, maka tidak akan ada lagi efektivitas umum yang kurang atau ditambahi. Sistem informasi akuntansi masih tetap melakukan pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data, juga masih melakukan pemasukan data dengan pengendalian yang terakurasi.

Selain dari laporan yang telah disebutkan tersebut, sistem juga dapat menghasilkan informasi lainnya. Namun dampak dari sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi ini sering juga membuat

karakter aktivitas berubah, seperti pengambilan data menggunakan peralatan yang secara khusus dibuat untuk mengambil data tersebut, hanya menggunakan sedikit kertas saja dalam membuat catatan akuntansi, otomatis dalam melakukan beberapa pertahapan proses. Hasil dengan bentuk yang bermacam-macam dan banyak serta rapi, serta dapat disebarluaskan kepada orang lain yang diinginkan. Tidak menutup kemungkinan perubahan ini akan meningkatkan hal lain, seperti:

1. Pemrosesan data serta transaksi lainnya menjadi lebih cepat,
2. Perhitungan yang lebih akurat dan pembandingannya yang lebih besar,
3. Biaya pada tiap pemrosesan lebih rendah,
4. Laporan dan hasil lainnya dapat selesai secara tepat pada waktunya,
5. Tempat data yang tersimpan lebih ringkas dan dapat jaungkauan akses yang lebih luas dan kapanpun saat diinginkan,
6. Pemasukan data yang dapat dipilih serta output yang tersedia lebih banyak dan luas.
7. Dapat meningkatkan produktivitas bagi pegawai serta karyawan menjadi lebih tinggi dan bagi manager dapat secara efektif dalam tanggung jawab dan pembuatan keputusan.

Bukan hanya organisasi bisnis saja yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, begitu juga dengan pemerintah dan organisasi sektor publik. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa untuk melanjutkan penyelenggaraan jalannya pembentukan yang sesuai dengan

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu didukung juga dalam (PP No. 65 Tahun, 2010) Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan dari teknologi informasi untuk peningkatan dalam kemampuan mengelola keuangan daerah, serta penyaluran dalam Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah Pusat juga Daerah mempunyai keharusan dalam pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi yang maju agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, serta dapat kepada pelayanan publik tentang Informasi Keuangan.

Jaringan sistem informasi manajemen perlu dibangun secara maksimal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar proses kerja pemerintahan dapat bekerja secara terpadu dan mengakses antar unit kerja dapat lebih sederhana.

Menurut Sutarman (2012) menyebutkan bahwa manfaat dari penerapan teknologi informasi yaitu:

1. Kecepatan

Kompleknya perhitungan dapat dilakukan oleh komputer dengan sangat cepat dibandingkan manusia yang mengerjakannya.

2. Konsistensi

Format yang telah ada dan sesuai standar sehingga hasil pengolahan yang tidak berubah-ubah dan tetap konsisten, berbeda

dengan manusia yang tidak dapat menghasilkan hasil pengolahan yang persis sama.

3. Ketepatan

Teknologi yang dimiliki oleh komputer tepat serta akurat, dapat menemukan suatu perbedaan dengan detail yang kasat mata oleh manusia.

4. Keandalan

Komputer dapat memberikan sebuah hasil yang lebih andal dan lebih dapat diyakini jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang dibuat pun lebih kecil dibandingkan apa yang dilakukan oleh manusia.

2.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan Umar Sako (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas penyajian laporan keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis determinasi menunjukkan variabel dependen (kualitas laporan keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penerapan SAP).

Penelitian yang dilakukan oleh Irman Mamulati (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil penelitian diperoleh secara parsial

standar akuntansi pemerintah (X1) dan penerapan sistem informasi keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sementara simultan standar akuntansi pemerintah (X1) dan penerapan sistem informasi keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh Alifia Ayu Kurnia (2022) yang meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kinerja keuangan, opini audit, dan pencegahan fraud terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian diperoleh bahwa standar akuntansi pemerintahan dan opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, kinerja keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pencegahan fraud tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Purnama Sari (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato.

Penelitian yang dilakukan Fransiska Tirza Lantu (2023) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sedangkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan secara simultan, kedua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Verlina Dwi Rahayu (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Madiun. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi SDM di Kabupaten Madiun sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Saran bagi pemerintahan Kabupaten Madiun adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi SDM, mengevaluasi kompetensi SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, serta meninjau proses implementasi standar akuntansi pemerintah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi perbandingan dengan kabupaten/kota lain,

penelitian jangka panjang untuk melacak perubahan dan perbaikan, serta meneliti peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Magfirah Imalia (2023) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng (BPKD)). Hasil penelitian secara parsial variabel Penerapan Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Adapun variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Secara simultan Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Feni Pirani (2023) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,277, sedangkan sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008 dan 0,000.

2.2.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan Pusat harus membuat laporan keuangan dengan menggunakan ketentuan dari SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan sebuah penerapan prinsip akuntansi yang dilakukan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari pemberlakuan hal tersebut adalah agar kualitas laporan keuangan baik di pusat ataupun daerah dapat meningkat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, akan membuat informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah memiliki berkualitas baik (Nyoman, et al, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas bisa dihasilkan dengan penerapan SAP oleh pemerintah daerah sehingga memiliki dapat memiliki informasi yang berguna, selain itu juga penerapan SAP yang efektif dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Ha : Ada pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

2.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Proses integral dari tindakan dan kegiatan yang terus dilakukan secara berulang-ulang oleh pimpinan dan pegawai memberikan kepercayaan yang cukup dalam mewujudkan tujuan bagi organisasi, hal ini didefinisikan sebagai pengendalian internal seperti yang tertulis dalam PP Nomor 60 tahun 2008 dengan efektif dan efisiennya kegiatan yang dilakukan, aset negara yang dijaga dengan aman, laporan keuangan yang andal. Sistem pengendalian internal ini adalah sebuah pengendali terutama dalam pengelolaan sistem informasi dengan tujuan akurasi yang pasti dan informasi yang lengkap. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan kegiatan pengendalian internal secara menyeluruh. Hal ini berhubungan dengan efektivitas laporan keuangan yang berkualitas yang dihasilkan dari baik buruknya implementasi dari sistem pengendalian internal.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gianya adalah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (Mahaputra dan Wayan Putra, 2014). Begitu pula di Kabupaten Tabanan yang memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (Sudianti, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan.

Ho : Tidak ada pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Ha : Ada pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

2.2.3. Pemanfaatan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah baik itu Pusat maupun Daerah harus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang maju agar dapat memberikan peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan, serta dapat kepada pelayanan publik tentang Informasi Keuangan. Kesempatan semua orang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara tepat dan akurat dapat dilakukan jika teknologi informasi berpotensi dengan pesat dimanfaatkan secara luas. Hasil penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh (Andrianto & Rahmawati, 2018) menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian lainnya dengan hasil yang serupa juga dilakukan oleh (Imelia et al., 2021). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

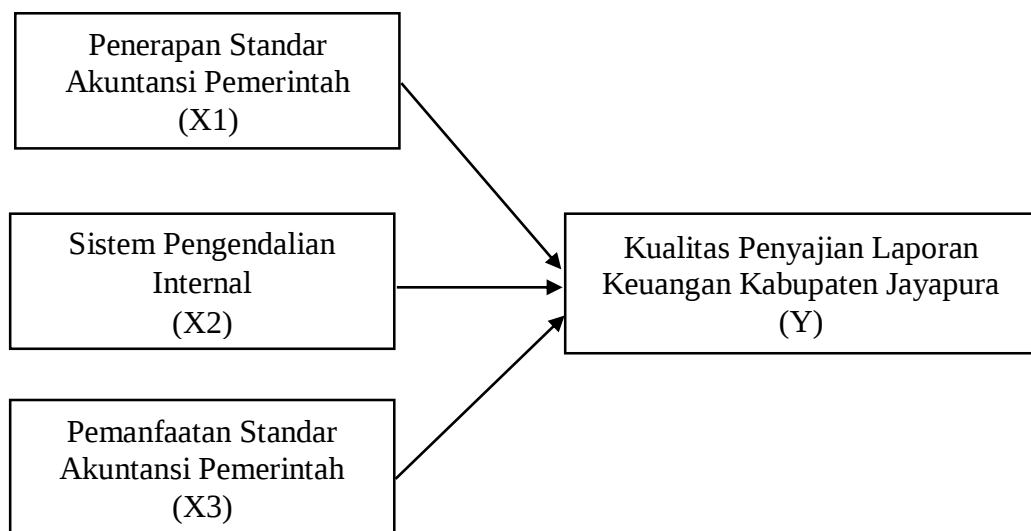
Berdasarkan penjelasan di atas, diduga pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Ho : Tidak ada pengaruh Pemanfaatan SAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Ha : Ada pengaruh Pemanfaatan SAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

2.3. Kerangka Pikir

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (Ayem & Prihatin, 2020). Kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif yang dipengaruhi oleh penerapan, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi SAP (Muslimin & Sulfianty, 2020). Laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Karim, 2019). Pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Hasanah & Siregar, 2021).



Gambar 2.1. Kerangka Teori